PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, KOMITMEN MANAJEMEN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal)

BENNY MANDALA PUTRA
20110420316

Dosen Pembimbing
Dr. IETJE NAZZARUDDIN, S.E., M.Si., Ak., CA

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

This study aims to get empirical evidence about the influence of external pressures, internal control, the uncertainty of the environment, management commitment and competence of human resources towards the implementation of the transparency of financial reporting SKPD.

Data collection method in this research is the use of a questionnaire survey. The questionnaire submitted to the apparatus working units (SKPD) at District of Tegal. Sample collecting by using Purposive sampling.A total of 110 questionnaires distributed back to 103 and can be processed as many as 94 questionnaire. The data collected is processed by using multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that the external pressure, internal control, positive significant effect against the transparency of financial reporting. While the uncertainty of the environment, management commitment, competence of human resources. no significant effect against the application of the transparency of financial reporting.

Keywords: External Pressure, Internal control, The Uncertainty Of The Environment, Management Commitment, Competence Of Human Resources, The Transparency Of Financial Reporting

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang telah dilaksanakan pada tahun 2001 dan peraturan undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah dalam UU No. 32 tahun 2004, menjelaskan bahwa definisi dari otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Tujuan utama dengan adanya otonomi daerah adalah untuk tercapainya *Good Goverment Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, dan salah satu upaya untuk mewujudkan *good government governance* adalah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara (Mahendra, 2013). Dimana pada era otonomi daerah saat ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat berharap bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Terdapat tiga mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu : Pertama, mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat. Kedua, memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan Ketiga, membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2006).

Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Hess, 2007). Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz, 1999) serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver, 2005).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012. Penelitian ini belum banyak dilaksanakan di daerah lain, beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti lain, seperti Fardian (2014) di SKPD Pemerintah Kota Padang, dan Julita dan Belian (2015) di Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan hasil yang berbeda.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, lokasi penelitian, periode penelitian, dan variabel penelitian. Lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Kabupaten Tegal pada tahun 2016. Peneliti menggunakan sampel SKPD di Kabupaten Tegal karena pada lokasi tersebut merupakan pemerintah daerah yang menerapkan transapransi pelaporan keuangan daerah. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan Dua variabel, diantaranya Pengendalian Internal dan Kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan berupa pengembangan teori terutama dalam bidang sektor public dan untuk menguji pengaruh tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Diharapkan dapat menjadi tambahan literatur mengenai faktor yang mempengaruhi penerapan

transparansi pelaporan keuangan yang dapat menjadi masukan, gambaran bagi kepala daerah guna memperbaiki, meningkatkan, dan memformulasikan kebijakannya di masa datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tekanan Eksternal

Isomorfisme koersif selalu terkait dengan segala hal yang terhubung dengan lingkungan di sekitar organisasi (Ridha dan Basuki, 2012). Isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya (DiMaggio dan Powell, 1983).

Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem (Ashworth *et. al*, 2009). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik.Di sisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (*legitimate coercion*) (Scott, 1987) dalam (Ridha dan Basuki 2012), sehingga hanya menekankan aspek-aspek positif agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi (Ridha dan Basuki 2012). Perubahan organisasi yang didasari kekuatan koersif akan menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan pengaruh politik dari pada teknis (*Ashworth et. al*, 2009).

Tekanan eksternal yang dimaksud disini adalah faktor luar organisasi yang dapat berpengaruh terhadap organisasi baik berpengaruh terhadap struktur maupun kegiatannya. Faktor eksternal diantaranya adalah adanya peraturan oleh organisasi

lain seperti pemerintah pusat, lembaga swadaya masyayarakat (LSM), dan lembaga lembaga lain. Adanya sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun pihak yang berkaitan sebenarnya bertujuan untuk menjadikan praktik dalam organisasi (SKPD) menjadi lebih baik. Jika tekanan eksternal yang terjadi akibat adanya kekuatan koersif pada pemerintah akan menyebabkan organisasi melakukan praktik praktik hal yang tidak di inginkan, seperti halnya terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan yang bersifat formalitas. Tanpa memikirkan tugas dan tujuan terjalankan lebih efektif dan efisiensi sesuai target.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012), Sihaoloho (2013), dan Hastuti (2015) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, berupa peraturan yang menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan.Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian yang telah dilakuka dapat di duga bahwa penerapan transparansi peloparan keuangan di pengaruhi oleh tekanan eksternal. Untuk itu, dapat dirumuskan hipotesis satu sebagai berikut:

H_1: Tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Pengendalian Internal

Xu, *et all*. (2003) dalam Sukmaningrum (2012) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas dari sebuah informasi, dimana keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia.Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik.

Indra Bastian (2006) dalam Amelia (2015) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO *(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)* (1992) dalam Sari (2012) adalah suatu proses, dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

a. Efektivitas dan efisiensi operasi
b. Keandalan pelaporan keuangan
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Tujuan yang pertama adalah menekankan pada tujuan dasar dalam setiap organisasi, mencakup kinerja, profitabilitas dan pengamanan sumber daya. Kedua adalah menyangkut kehandalan laporan organisasi. Terakhir adalah berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dimana organisasi itu berada.Sistem pengendalian internal bukan hal baru dalam pemerintahan dimana dalam pemerintahan pengendalian internal menjadi bagian penting dalam organisasi. Pengendalian internal digunakan untuk menjalankan proses eksekusi oleh pihak kepala daerah/dinas maupun anggota guna pencapaian tujuan dalam organisasi. Semakin sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik di dalam pemerintahan, maka pengungkapan proses transparasi pelaporan keuangan akan menjadi lebih transparan. Karena dengan sistem pengendalian internal, organisasi dapat

mengarahkan, mengawasi serta dapat mengukur sumber daya yang ada di dalam organisasi. Begitu juga sebaliknya jika dalam organisasi pemerintah tidak di terpkan pengendalian internal secara baik maka tujuan dan proses eksekui yang ada tidak berjalan dengan baik.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pengendalian Internal terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Sari (2012), Amelia (2015), Alim (2015), Hastuti (2015) menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, berupa sistem untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan di pengaruhi oleh pengendalian internal.Untuk itu, dapat dirumuskan hipotesis Dua sebagai berikut:

H_2: Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Ketidakpastian Lingkungan

Isomorfisme mimetik adalah kecenderungan organisasi untuk memodelkan dirinya pada perilaku organisasi lain (DiMaggio dan Powell, 1983) muncul sebagai tanggapan untuk suatu ketidakpastian (Mizruchi dan Fein, 1999) akan suatu standar tertentu. Isomorfisme mimetik termasuk di dalamnya *benchmarking* dan mengidentifikasi praktik terbaik yang ada di lapangan (Tuttle dan Dillard, 2007).Ketidak pastian lingkungan sering terjadi dalam setiap organisasi.Ketidakpastian lingkungan bisa disebabkan oleh berbagai hal dari luar

organisasi.seperti perubahan kebijakan kebijakan dan peraturan yang tidak menentu dalam setiap waktu dan perbedaan peraturan yang ada akibat suatu dugaan lainnya

Menurut Milliken (1987) ketidakpastian lingkungan adalah rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi sesuatu secara akurat dari seluruh faktor sosial dan fisik yang secara langsung mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan orang-orang dalam organisasi.Menurut Luthans (1998) ketidakpastian lingkungan adalah situasi seseorang yang terkendala untuk memprediksi situasi di sekitarnya sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian tersebut.Fisher (1996) menyebutkan bahwa pada kondisi ketidakpastian tinggi, individu sulit untuk memprediksi kegagalan dan keberhasilan dari keputusan yang dibuatnya. Sehingga membuat organisasi merubah proses dan struktur tertentu yang telah ada untuk menyesuaikan dengan keadaan. Adanya penerapan perubahan dalam penyesuaian keadaan baik proses, struktur tatanan ataupun sistem yang digunakan dalam organisasi mengakibatkan pemahaman individu akan organisasi yang kurang, khusunya dalam penerapan hal hal baru. Disebabkan ketidaksiapan organisasi dalam bertransformasi ke hal yang baru.

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada pihak luar (Ridha dan Basuki, 2012). Hal tersebut sesuai dengan konsep keterandalan (reliabilitas) dimana informasi dalam laporan kuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan materil, sesuai fakta, jujur dan dapat di verifikasi (PP No.24/2005, Lampiran II: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah No.35). menurut Intakhan dan Ussahawanitchakit (2009) dalam Ridha dan Basuki (2012) keterandalan dalam transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh ketidak pastian

lingkungan dari jenis jenis yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Akan tetapi adanya peraturan pemerintah terkait transparansi pelaporan keuangan akan mendorong organisasai untuk menyampaikan informasi secara detil baik proses ataupun praktik yang ada dalam laporan keuangan untuk memenuhi prasyarat kualitas keandalan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Fardian (2014), Julita dan Belian (2015), dan Satyaningsih dkk (2014) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya , peneliti akan meneliti apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Untuk itu, ada kemungkinan hipotesis tiga dirumuskan sebagai berikut:

H_3: Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Komitmen Manajemen

DiMaggio dan Powell (1983) dalam Ridha dan Basuki (2012) menyatakan bahwa ismorfisme normative terkait dengan profesionalisme. Perubahan komitmen dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi (Dacin et al, 2002). Paine (1994) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Institusionalisasi sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai

dan prinsip-prinsip (Selznick, 1992 dalam Dacin, 2002 dalam Ridha dan Basuki, 2012). Transparansi merupakan salah satu nilai atau prinsip (PP No. 58/2005, Penjelasan Pasal 4 ayat 1) yang harus dipegang oleh organisasi dalam pengelolaan keuangannya (Ridha dan Basuki, 2012).

Menurut Nadirsyah (2008), komitmen manajemen adalah suatu keyakinan dan dukungan yang kuat dari manajemen untuk melakukan, menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan secara bersama sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat dicapai. Pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi sehingga orang bekerjasama dengan efektif untuk mencapai sasaran organisasi (Mukjizat, 2000 dalam Saputra, 2015).Dengan mencapai sasaran organisasi yang efektif, transparansi dapat diterapkan seiring dengan jalannya organisasi yang baik.Dalam artian profesionalsime dalam organisasi baik mematuhi, menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan dan hukum merupakan suatu wujud dalam komitmen organisasi.dimana prinsip prinsip dan nilai nilai kepatuhan akan kebijakan dan hukum merupakan suatu hal yang harus dipegang dan di lakukan oleh organisasi dalam pengelolaan keuangannya (PP. No. 58/2005, penjelasan Pasal 4 Ayat 1).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012), Hastuti (2015), dan Dewi *et. al*. (2015), Prasetya (2015), Saputra (2015) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.Dari uraian di atas dan hasil penelitian sebelumnya dapat di duga

bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh komitmen manajemen.Untuk itu dapat dirumuskan hipotesis empat sebagai berikut:

H_4: Komitmen manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Setiawati (2013) dalam Al-Amin (2015) menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan karyawan yang ada, sebagai kesatuan SDM harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan suatu dengan lainnya dan bersama sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.

Komptensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja indvidu dalam pekerjaannya (Spencer dan Spencer, 1993 dalam Saputra 2015).Fardian (2014) menambahkan Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang di tunjukan oleh kemampuanya untuk konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi salah suatu fungsi pekerjaan yang spesifik. Menurut Primayana, dkk (2008) Kapasitas sumber daya manusia ialah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kapasitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggung jawab tersebut diuraikan didalam *job description.*Menurut Indriasari dan Naharto (2008) dalam Saputra (2015), sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang

atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Fardian (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.Berdasarkan uraian diatas dan penelitian sebelumnya maka dapat irumuskan hipotesisi lima sebagai berikut:

H_5: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

III. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Kab. Tegal. sampel yang digunakan adalah pejabat keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah daerah di setiap SKPD Kab. Tegal. Dimana mereka yang berperan penting dan bertindak secara langsung dalam pembuatan anggaran di 26 SKPD. Sehingga mereka dapat mengetahui secara langsung bagaimana Penyusunan pelaporan keuangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan kuesioner. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Atau dengan kata lain data primer ini harus dicari sendiri oleh peneliti. Kelebihan data primer ini adalah peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, peneliti dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitian dengan ketersediaan data di lapangan. Yang data tersebut dapat diperoleh dari masing-masing staff di bagian keuangan setiap SKPD.

Teknik pengambilan sample ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sample dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Penelitian ini mengambil populasi unsur-unsur atau Dinas Pemerintahan Kab. Tegal. Sedangkan responden dimana masing-masing SKPD disebar 4-5 kuesioner. Dengan kriteria pemilihan responden adalah:

a. Setiap staff di bagian keuangan tiap-tiap SKPD mengetahui secara langsung dalam penyusunan anggaran.
b. Setiap dibagian keuangan tiap-tiap SKPD juga turut serta secara langsung dalam penyusunan anggaran.
c. Setiap staff keuangan tiap-tiap SKPD mempunyai anggapan tersendiri atas terjadinya perubahan dalam penyusunan anggaran.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di 26 SKPD KabupatenTegal. Masing-masing SKPD disebar 3-6 kuesioner. Sampel terdiri dari 110 orang di SKPD bagian keuangan Kota Tegal, dari 110 kuesioner yang disebar berhasil terkumpul sebanyak 103 kuesioner. Kuesioner yang layak digunakan untuk analisis sebanyak 94 kuesioner, karena terdapat 7 kuesioner yang tidak diisi secara lengkap.

TABEL 4.1.
Sampel dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	110
Kuesioner yang tidak kembali	7
Kuesioner yang kembali	103
Kuesioner yang tidak diisi secara lengkap	7
Kuesioner yang dapat diolah	94
Tingkat pengembalian	85%

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Normalitas data diuji dengan menggunakan metode uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov (KS)*. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.10.
Hasil Uji Normalitas

	Z	Asymp-sig	Keterangan
One Sample KS	0,980	0,292	Data berdistribusi normal

Sumber: Hasil analisis data

Nilai *Asymp. Sig.* (*2-tailed*) dari KSZ *unstandardized residual* yang diperoleh pada Tabel 4.9 sebesar 0,980 > 0.05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil hasil uji multikolinearitas menggunakan metode *variance inflation factor* (VIF) disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.11.
Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
TE	0,693	1,442	Tdk terjadi multikolinearitas
PI	0,454	2,203	Tdk terjadi multikolinearitas
KL	0,568	1,761	Tdk terjadi multikolinearitas
KM	0,497	2,014	Tdk terjadi multikolinearitas
KSDM	0,430	2,326	Tdk terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.10 memperlihatkan tidak terdapat variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak ada yang lebih dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

3. Heteroskedastisitas

Ringkasan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.12.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Variabel	Sig	Kesimpulan
RES2	TE	0,069	Non heteroskedastisitas
	PI	0,377	Non heteroskedastisitas
	KL	0,425	Non heteroskedastisitas
	KM	0,548	Non heteroskedastisitas
	KSDM	0,212	Non heteroskedastisitas

Sumber: Hasil analisis data

Hasil perhitungan tabel 4.11 menunjukkan tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhivariabel terikat nilai Abs e. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

B. Uji Analisis Data

1. Uji signifikansi nilai t

a. Pengujian hipotesis pertama (H1)

Variabel Tekanan Eksternal memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,112 dan nilai t sebesar 1,175 serta nilai sig (0,079) > α (0,05), berarti Tekanan Eksternaltidak berpengaruh positif terhadap penerapan Trasnparansi Pelaporan Keuangan.Hipotesis pertama (H1) tidak terbukti/ditolak.

b. Pengujian hipotesis kedua (H2)

Variabel Pengendalian Internal memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,441 dan nilai t sebesar 3,685 serta nilai sig (0,000) < α (0,05), berarti

Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hipotesis kedua (H2) terbukti/diterima.

c. Pengujian hipotesis ketiga (H3)

Variabel Ketidakpastian Lingkungan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,105 dan nilai t sebesar 0,876 serta nilai sig (0,383) > α (0,05), berarti Ketidakpastian Lingkungantidak berpengaruh positif terhadap penerapan Trasnparansi Pelaporan Keuangan.Hipotesis pertama (H3) tidak terbukti/ditolak.

d. Pengujian hipotesis keempat (H4)

Variabel Komitmen Manajemen memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,133 dan nilai t sebesar 0,136 serta nilai sig (0,259) > α (0,05), berarti Komitmen Manajementidak berpengaruh positif terhadap penerapan Trasnparansi Pelaporan Keuangan.Hipotesis pertama (H4) tidak terbukti/ditolak.

e. Pengujian hipotesis kelima (H5)

Variabel Kompetensi Dumber Daya Manusia memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,195 dan nilai t sebesar 1,390 serta nilai sig (0,168) > α (0,05), berarti Kompetensi Sumber Daya Manusiatidak berpengaruh positif terhadap penerapan Trasnparansi Pelaporan Keuangan.Hipotesis pertama (H5) tidak terbukti/ditolak.

2. Uji signifikansi nilai F

Hasil perhitungan pada Tabel 4.13 diperoleh nilai f_{hitung} sebesar 20,360 dengan nilai sig (0,000) < α (0,05) yang berarti terdapat pengaruh yangsignifikan variabel-variabel Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama terhadap penerapan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

3. Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R square* sebesar 0,510 menunjukkan bahwa 51,% variasi penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sedangkan sisanya sebesar 49% dijelaskan variabel lain di luar model.

C. Pembahasan

1. Tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel Tekana Eksternal (H_1) menunjukkan bahwa Tekanan Eksternal tidak berpengaruh signifikan tapi tidak berpengaruh negatif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah daerah Tegal. Dengan demikian (H_1) di tolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig yang diperoleh sebesar 0,078, yang lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 akan tetapi *koefisien regresi* sebesar 0.112 menunjukkan arah positif. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi, dkk (2013) dan Hasil penelitian Julita dan Belian(2015) menyatakan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah daerah.

Tekanan eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar organisasi seperti peraturan-peraturan pemerintah (regulasi). Regulasi yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Govindajaran dalam Ridha 2012). Perubahan tersebut akan mengakibatkan sulitnya penyesuaian dalam pemahaman organisasi bertransformasi ke peraturan maupun kebijakan yang baru, dan mengakibatkan terjadinya formalitas dalam praktik menjalankan peraturan tersebut. Perubahan (regulasi) yang cepat akan menuntut orgnisasi untuk bergerak cepat dalam menjalankan strategi dan misinya. Hal ini

bertujuan untuk mengantisipasi adanya lingkungan yang sering berubah, hal inilah yang akan mempengaruhi beberapa halpenting yang sudah diatur organisasi sebelumnya seperti perencanaan dan pengendalian.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) yang menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sedangkan hasil dalam penelitian ini tekanan eksternal tidak berpengaruh secara positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2. Pengendalian Internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel Pengendalian Internal (H_2) menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah daerah kab Tegal. Dengan demikian (H_2) Diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai *sig* yang diperoleh sebesar 0.00, yang lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 dan *koefisien regresi* sebesar 0,441. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pengendalian Internal terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Diana (2012), Amelia (2015), Alim (2015), Hastuti (2015).Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Internal di SKPD Kab. Tegal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, berupa sistem untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan.

3. Ketidakpastian Lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel Ketidakpastian Lingkungan (H_3) menunjukkan bahwa Ketidakpastian Lingkungan tidak berpengaruh signifikan di pemerintah daerah Kab. Tegal, dengan demikian (H_3) ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig yang diperoleh sebesar 0.383, yang lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 dan *koefisien regresi* sebesar 0,105. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ridha dan Basuki (2012), Mahendra (2013) dan Sihaloho, dkk (2013) yang menyatakan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Dengan kata lain ketidakpastian lingkungan tidak dapat meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan di SKPD Kab. Tegal. Ketidakpastian lingkungan pada kenyataan terjadi dan dialami oleh SKPD. Ketidakpastian lingkungan yang muncul dapat disebabkan oleh sering terjadinya perubahan peraturan terkait pengelolaan keuangan. Hal ini akan berdampak pada sulitnya SKPD untuk segera menyesuaikan praktiknya dengan peraturan yang baru (Ridha dan Basuki, 2012). Ketidappastian Lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan hal ini dikarenakan, organisasi biasanya telah memprediksi dan melakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap kondisi lingkungan disekitarnya.Kemampuan memprediksi keadaan di masa datang pada kondisi ketidakpastian lingkungan rendah dapat juga terjadi pada individu yang berpartisipasi dalam transparansi pelaporan keuangan agar memudahkan memperoleh informasi dari bawahannya. Jadi, hal ini dapat menguntungkan organisasi dalam pelaporan keuangan apabila terjalinnya kerjasama yang baik antara atasan dengan bawahan (Sihaloho dkk, 2013).

4. Komitmen Manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel Komitmen Manajemen (H_4) menunjukkan bahwa Komitmen Manajemen tidak berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig yang diperoleh sebesar 0.259, yang lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 dan *koefisien regresi* sebesar 0,133. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Desmiyawati (2014), Purnamasari (2015) yang menyatakan Komitmen Manajemen tidak begitu berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Hampir keseluruhan SKPD yang ada di wilayah Kab. Tegal belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab dengan integritas dan komitmen yang tinggi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan, SKPD tidak hanya melaporkan informasi yang hanya bersifat positif saja bagi SKPD berupa capaian, akan tetapi juga berupa ketidaktercapaian. hal ini bisa dilihat dari loyalitas para aparatur pemda dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pekerjaan juga masih rendah. Kemudian adanya regulasi baik peraturan daerah (Perda) maupun undang undang hanya sebagai pendorong untuk diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. Dan ini menjadikan Komitmen Manajemen tidak begitu berpengaruh dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah Kab. Tegal.

5. Kompetensi Sumber Daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (H_5) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifkan dan tidak berpengaruh negatif terhadap penerapan transparani Pelaporan

keuangan di pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig yang diperoleh sebesar 0.168>dari nilai *alpha* 0,05 dan mempunyai *koefisien regresi* sebesar 0,195. oleh karena itu (H_5) ditolak. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh Purnamasari (2015).

Lemahnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan disebabkan kondisi sumber daya manusia yang di sub bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang belum mendukung sepenuhnya dengan baik, dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagian besar pegawai yang ada di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Dari sisi kuantitas, masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada saja yang diberdayakan. Kelemahan yang ada diimbangi dengan tidak mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan bendahara, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Purnamasari (2015). Hal ini yang menyebabkan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah Kab. Tegal.

V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan eksternal, Pengendalian Internal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia, terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Adanya Perda maupun Peraturan Undang-undang tidak menjadi pengaruh yang besar dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD di Kabupaten Tegal. Terjadinya perubaha cepat dalam regulasi yang ada di pemerintah Kabupaten Tegal tidakmenuntut besar dalam SKPD di Kabupaten Tegal untuk bergerak cepat menyesuaikan sejalan dengan regulasi yang ada. Namun adanya pengendalian internal yang baik di SKPD Kab. Tegal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah Kabupaten Tegal, berupa sistem untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan.

kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh aparatur di sebagian besar Dinas, Badan, maupun Kantor belum sesuai dengan bidang dan keahlian maupun standar yang ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Tegal tetap ada dan di pertanggung jawabkan

2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

a. Menambah variabel penelitian, seperti faktor politik dan Aksebilitas laporan

keuangan guna mengetahui sebab lain yang mempengaruhi penelitian ini.

b. Metode survey dilaksanakan hendaknya dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan sehingga pengisian kuisioner menjadi lebih objektif.

c. Membedakan kelompok responden berdasarkan jabatan sebagai pegawai dan spesifikasi jurusan pendidikan terakhir. Hal ini guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik.

d. Memperluas area dan sampel penelitian, seperti penelitian se-Jawa atau secara nasional.

3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

a. Penelitian ini hanya diuji dengan data kuantitatif berupa kuesioner yang disebar kepada responden, sehingga hasil penelitian belum menunjukkan secara detail mengenai transparansi pelaporan keuangan.

b. Penggunaan instrumen kuesioner terkadang dapat menimbulkan bias penelitian, dikarenakan jawaban dari responden terkadang tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

c. Obyek penelitian terbatas pada 26 SKPD di Kab.Tegal sehingga tingkat generalisasinya masih rendah.

Daftar Pustaka

Al-Amin, M. R. 2015. Faktor Komitmen Aparatur, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Tingkat Pendidikan, terhadapa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Sensus Pada Pemerintah Kota Metro). *Skripsi Strata-1*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Alim, E. K. 2015. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Pada Pegawai Pemda Pejabat Eselon 4 yang sudah bekerja selama satu tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi Strata-1*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta

Amelia, R. 2015. Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru). *Jurnal Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.

Anshori, H. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Dan Pengungkapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Skripsi Strata-1*, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

Aryansyah. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi penungkapan informasi akuntansi di internet. *Skripsi-Strata-1*, Universitas Diponegoro Semarang

Ashworth *et. al*.. 2009. Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. *Journal of Public Administration Research and Theory.*

Cavalluzzo, K. S. dan Christopher, D. I. 2004. Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence from Government. Accounting, Organizations and Society. *Social Science Electronic Publishing.*

Chong, V. K., dan Kar, M. C. 2002. Budget Goal Commitment and Informational effect of Budget Participation on Performance: A Structural equation Modelling Approach. *Behavioral Research in Accounting: February 2002*, Vol. 14, No. 1, pp. 65-86.

Dacin *et, al*. 2002. Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. *The Academy of Management Journal.*

Dewi *et. al*. 2015. Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Karangasem). *Jurnal Akuntansi Program S1: Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 1 No. 3*.

DiMaggio, P. J. dan Walter, W. P. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, Volume 48, Issue 2 (Apr., 1983), 174-160).

Fardian, D. 2014. Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

(Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang). *ejournal.unp.ac.id.* diakses pada 25 April 2016.

Fisher, C. 1996. The Impact of Perceived Environmental Uncertainty and Individual Differences on Management Information Requirement. *Acconting, Organizations and Society,* Volume 21, Issue 4, May 1996, Pages 361–369.

Frumkin, P. Dan Galaskiewichz, J. 2004. Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. Journal of Public Administration Research and Theory. *Journal of Public Administration Research and Theory.*

Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.Badan Penerbit-UNDIP. Semarang

Hastuti, A.I. 2015. Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali. Naskah Publikasi S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hess, D. 2007. Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. *Business Ethics Quarterly,* Volume 17, Issue 03, July 2007, page 453-476.

Hilmi, Z, A. dan Martani, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

Hood, C. 2007. What Happens When Transparency Meets Blame-Avoidance?. *Public Management Review,* DOI:10.1080/14719030701340275 pages 191- 210.

Imron, M. 2003. Pengaruh ketidakpastian Lingkungan dan Strategi Bisnis Terhadap hubungan Antara Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Broadscope dengan Kinerja Unit Bisnis Strategi. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia,* Vol. 1 2003.

Julita dan Belian, E. S. 2015. *Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru*. repository.unri.ac.id. Diakses pada 25 April 2016.

Jun, K. N. dan Christopher. W. 2010. Institutional Motivations in the Adoption of Innovations: The Case of E-Government. *Journal of Public Administration Research and Theory.*

Kirmizi, R. dan Zainuddin, Y. 2002. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Manajemen: Struktur Organisasi sebagai Faktor Moderasi*., Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol. 5, No. 1, pp. 102-118.

Luthans, F. 1998. Organisasi Behavior, Eighth Edition. McGraw-Hill *Internasional Book Company*: New York.

Mahendra, D. 2013. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Skripsi* FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Mardiah dan Gudono. 2001. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Disentralisasi terhadap Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia 4 Januari 2001*.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Edisi II. Andi Offset: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah,* Vol. 2 No. 1.

Meyer, J. W. dan Brian, R. 1977. Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 2 (Sep., 1977), pp. 340-363.

Milliken, F. J. 1987. Three Types of Perceived Uncertainty about Environment: State, Effect, and Response Uncertainty. *Academy of Management Review* 12, Vol. 12, No. 1 (Jan., 1987), pp. 133-143.

Mizruchi, M. S. dan L. C. Fein. 1999. The Social Construction of Organizational Knowledge A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism. *Administrative Science Quarterly*.

Nadirsyah. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Aceh Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan.* Vol. 3 No.1.

Paine, L. S. 1994. Managing Organizational Integrity. *Harvard Business Review,* March–April 1994.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

Prasetya. K. A. (2015). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Skripsi Strata-1,* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

Primayana dkk. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak* Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1.

Purnamasari. 2015. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo). *Skripsi*: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA): Surabaya.

Piotrowski, S. J., dan Bartelli, A. 2010. *Measuring Municipal Transparency*. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April.

Ridha, M. A dan Basuki, H. dan 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin*.

Sari, D. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung: SNAB Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional

Saputra, M. R. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Dan Kota Magelang). *Skripsi:*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY): Yogyakarta

Satyaningsih *et. al.* 2014. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *Jurusan Akuntansi Program S1: Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 1*.

Sihaloho *et. al*. 2013. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Publikasi* Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Silver, D. 2005. Creating Transparency for Public Companies the Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist; Winter* 2005, Vol. 11 Issue 1, p14.

Stiglitz, J. E. 1999. On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life. *Oxford Amnesty Lecture, Oxford: U.K.*

Sukmaningrum, T. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (study empiris pada pemerintah Kota dan Kabupaten Semarang). *Jurnal Skripsi* Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. CV.Alfabeta: Yogyakarta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Widiastuti, A. Novita. 2005. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen *Broadscope* dan *Timeliness* Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015